

## Politisi PD: Mungkin Jokowi Sudah Jarang Ajak Moeldoko Ngopi

JAKARTA (IM) - Kepala KSP Moeldoko, yang dituntut terlibat isu akan mengundaketa Kepemimpinan Agus Harimurty Yudhotomo (AHY) di Partai Demokrat (PD), heran terhadap pihak-pihak yang grogi saat dia ngopi-ngopi.

Menanggapi hal ini, polisi PD menduga Moeldoko sibuk mencari teman ngopi karena sudah jarang diajak langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mungkin Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jarang mengajak KSP Moeldoko ngopi-ngopi. Begitu juga rekan sesama menteri, sudah jarang mengajak KSP Moeldoko ngopi-ngopi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya untuk menanggapi pernyataan Moeldoko, Minggu (7/2).

"Jadi, KSP Moeldoko sibuk cari teman buat ngopi-ngopi. Sampai mesti ngopi-ngopi dengan kader Demokrat, yang notabene tidak di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Herzaky menyebut Moeldoko rela repot-repot mengajak kader Demokrat ngopi. Menurut informasi yang dia dapat dari kader, Herzaky

menyebut kader yang diajak ngopi itu juga mulanya tak tahu bakal berjumpa Moeldoko.

"Kader-kader kami pun banyak yang tidak terima dibohongi. Bisa-bisanya dibohongi dan dipaksa bertemu dengan beliau untuk yang katanya ngopi-ngopi, tapi ternyata diajak ikut dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Makanya mereka kemudian melapor ke Ketua Umum AHY, karena mereka menentang keras GPK PD, terutama karena ada orang dekat kekuasaan yang terlibat di dalamnya," sebut Herzaky.

Di akun Instagram resmi Moeldoko, @dr\_moeldoko, pada Sabtu (6/2), ia mengunggah foto sedang memegang cangkir dengan ketenangan sedang ngopi. Dalam foto, ia terlihat mengenakan baju putih dan jaket biru.

"Aku nambah kopi, ada yang semakin grogi," demikian tulisan yang menyertai di foto tersebut.

Dalam caption-nya, Moeldoko mengatakan tidak pantas jika seseorang langsung pergi setelah menghabiskan secangkir kopi. Terlebih, saat ada rekan yang bergabung untuk ngopi. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## PERKEMBANGAN KASUS COVID-19 DI INDONESIA

Satgas COVID-19 berjaga di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/2). Data statistik Johns Hopkins University Medicine mencatat Indonesia turut menyumbang 1,09 persen dari kasus positif COVID-19 di dunia, dari total 105.486.140 pasien positif secara global per Sabtu malam, (6/2/2021).

## Wamenag Sebut SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Sesuai Amanat Konstitusi

Keluarnya SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah.

JAKARTA (IM) - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menanggapi diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang tak memperbolehkan pemerintah daerah (pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama. Menurut Zainut, keluarannya SKB 3 Menteri yang mengatur

penggunaan pakaian seragam sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi.

"Keluarnya SKB 3 Menteri mempertegas jaminan hak kebebasan beragama baik siswa, guru maupun tenaga kependidikan di sekolah," kata Zainut dalam keterangan tertulis, Minggu (7/2).

Zainut mengatakan, dalam SKB itu juga menegaskan

adanya jaminan hak untuk memilih apakah akan menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa atau dengan kekhasan agama tertentu. Sehingga dengan ketentuan ini, kata dia, siswa yang beragama lain dari agama yang dianut mayoritas siswa di sekolah tertentu dijamin hak beragamanya untuk bebas memilih pakaian seragam yang akan dikenakannya.

Jaminan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan adanya hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaan dan agamanya.

"Untuk hal tersebut hen-

daknya masyarakat tidak perlu apriori terhadap penerbitan SKB 3 Menteri, karena tujuannya justru untuk melindungi hak asasi siswa, guru dan tenaga kependidikan di sekolah," kata Zainut.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat ini pun berpendapat, substansi SKB itu secara tegas menyebut tidak ada larangan untuk mengenakan seragam atau atribut agama tertentu. Adapun yang dilarang, lanjut Zainut, adalah pemaksaan mengenakan seragam atau atribut agama di sekolah. "Ini artinya negara tetap membolehkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan mengenakan pakaian sesuai keyakinan agama masing-masing," kata Zainut.

"Dengan demikian tuduhan negara melakukan sekularisasi kurang tepat dan berlebihan," ucapnya.

Lebih lanjut, Zainut menuturkan, terbitnya SKB 3 Menteri sudah sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, plural dan bhinneka.

"Hadirnya SKB diharapkan dapat menghindarkan sikap berlebihan para pengambil kebijakan dalam membuat peraturan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan

beragama di masyarakat," ucap Wakil Ketua Umum DPP PPP ini.

"Dengan SKB diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan hidup dalam keberagaman dan kebhinekaan. Sehingga akan melahirkan sikap keberagaman yang inklusif dan toleran," kata Zainut.

Untuk diketahui, pemerintah resmi tak memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," kata Nadiem sebagaimana dikutip, Rabu (3/2). ● mei



IDN/ANTARA

## PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Petugas bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan saat kegiatan vaksinasi massal dosis pertama di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (7/2). Kementerian Kesehatan hingga Minggu (7/2) telah memberikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama kepada 784.318 orang, sementara untuk vaksinasi tahap kedua sudah diberikan kepada 139.131 orang.

## Nomor WA Ketua Partai Demokrat Diretas, Sempat Kirim Pesan Aneh

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Didik Mukrianto mengaku bahwa nomor WhatsApp-nya sempat diretas oknum tak bertanggung jawab. Didik menyebut nomor WA-nya mengirimkan pesan aneh ke beberapa orang.

"Sahabat yang budiman 3 menit lalu Whatsapp saya diretas orang. Sempat mengirimkan ke beberapa no kontak WA dengan pesan yang aneh-aneh," kata Didik, melalui akun Twitter-nya, @DidikMukrianto, Sabtu (6/2), pukul 20.55 WIB.

Didik meminta masyarakat mengabaikan pesan-pesan aneh yang dikirimkan nomor WA-nya. Dia memastikan akan menginformasikan

kembali jika nomor WA-nya sudah pulih.

"Sekarang sedang recovery. Kalau ada pesan aneh-aneh u/ sementara waktu diabaikan. Seandainya sudah pulih akan saya infokan kembali. Thx," tulis Didik.

"Ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik ataupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi Undang-Undang Pemilu," kata Fadli dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/2).

Fadli mengaku setuju bahwa setiap undang-undang, termasuk UU Pemilu, diharapkan memiliki masa berlaku yang panjang. Ia juga memahami banyaknya pihak yang berharap UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat diberlakukan untuk dua, tiga, atau bahkan lima kali penyelenggaraan pemilu.

Namun untuk mewujudkan hal ini, kata Fadli, harus dipastikan bahwa Undang-Undang Pemilu memadai diberlakukan dalam jangka panjang. Sementara, melihat banyaknya persoalan yang ada di UU Pemilu saat ini, Fadli menilai bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tak memadai sehingga harus direvisi.

"Gerindra tidak boleh merasa lelah, tetap bersabar dalam menghadapi situasi tersebut sehingga kita menjadi perekat persatuan, kesatuan dan kekuatan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia," kata Muzani.

Di tengah masa pandemi Covid-19, Prabowo berpesan agar kader Partai Gerindra melakukan pergerakan politik dengan cara baru.

"Pak Prabowo berpesan kepada kader dalam berjuang jangan cepat menyerah, jangan merasa kalah, kesabaran harus menjadi sebuah cara perjuangan untuk terus konsisten dan agar perjuangan dapat terus tetap dipertahankan," kata Muzani.

Adapun petinggi-petinggi Gerindra yang dikuatkan Prabowo antara lain Suferi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Sandiaga Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra. ● han

## Perludem Pertanyakan Sikap Pemerintah dan Parpol yang Menolak Revisi UU Pemilu

JAKARTA (IM) - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mempertanyakan sikap pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR yang enggan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Argumen yang menyebutkan bahwa UU Pemilu tak perlu direvisi setiap lima tahun sekali, menurutnya, tak cukup kuat sebagai alasan.

"Ini sangat patut dipertanyakan dan juga menjadi sangat aneh baik partai politik ataupun pemerintah merasa tidak perlu melakukan revisi Undang-Undang Pemilu," kata Fadli dalam sebuah diskusi daring, Minggu (7/2).

Fadli mengaku setuju bahwa setiap undang-undang, termasuk UU Pemilu, diharapkan memiliki masa berlaku yang panjang. Ia juga memahami banyaknya pihak yang berharap UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat diberlakukan untuk dua, tiga, atau bahkan lima kali penyelenggaraan pemilu.

Namun untuk mewujudkan hal ini, kata Fadli, harus dipastikan bahwa Undang-Undang Pemilu memadai diberlakukan dalam jangka panjang. Sementara, melihat banyaknya persoalan yang ada di UU Pemilu saat ini, Fadli menilai bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tak memadai sehingga harus direvisi.

"Kalau sekarang konteksnya semua pihak merasakan ada problem dari kerangka hukum Pemilu yang berlaku sekarang, baik di dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada, masa iya kita mau memaksakan ini bisa berlaku 3-4 kali Pemilu?," ujar Fadli.

"Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dan dikuatkan, dan itu disadari oleh semua pihak ketika menginisiasi perbaikan revisi UU Pemilu ini," tuturnya.

Fadli pun menyayangkan sikap sejumlah fraksi partai politik di DPR yang menolak revisi UU Pemilu karena mengikuti sikap pemerintah. Seharusnya, kata Fadli, DPR bisa melihat lebih dalam kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk menata ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada. Jangan sampai revisi UU Pemilu dibatalkan karena adanya kepentingan segelintir pihak terkait kontestasi politik. "Kan tidak semua juga keinginan dari pemerintah itu harus dituruti sekalipun mereka adalah partai politik koalisi dari pemerintah yang saat ini berjalan," katanya.

Fadli juga menyayangkan argumen pemerintah yang seolah tak ingin ada revisi UU Pemilu karena situasi pandemi Covid-19 masih terjadi. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, UU Pemilu justru harus direvisi sekaligus untuk men-

gakomodasi kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan di tengah situasi bencana non-alam.

"Jadi secara formal menurut saya ini memang sangat perlu untuk ditunggu dan kita berharap muaranya adalah perbaikan terhadap kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu ke depan," kata Fadli.

Diberitakan, jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih jadi perdebatan seiring dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sembilan fraksi di DPR terbelah. Sebagian fraksi ingin Pilkada dilaksanakan sesuai amanat Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni November 2024.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong agar pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 Ayat (2) dan (3), yaitu pada 2022 dan 2023.

Perdebatan tentang jadwal pelaksanaan Pilkada juga sempat didiskusikan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'arif Amin.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengisyaratkan bahwa dirinya enggan UU Pemilu direvisi. Ia ingin undang-undang tersebut dalam jangka waktu yang lama. ● han

## Simulasi, TNI AL Baku Tembakan dengan Penyandra Awak Kapal di Asahan

ASAHAN (IM) - Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) terlibat baku tembakan dengan penyandra sejumlah awak kapal di Perairan Asahan, Sumatera Utara.

Sebanyak tujuh kapal patroli keamanan laut Lanal Tanjung Balai Asahan, mengemudikan sebuah kapal yang dikuasai perompak di Perairan Asahan. Suasana menegangkan terjadi saat perompak melakukan perlawanan.

Dalam penyerangan kapal, petugas melakukan tembakan peringatan namun petugas diserang dengan tembakan dari dalam kapal. Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas menguasai kapal dan menangkang para perompak dan menyelamatkan sandera.

Namun, hal tersebut hanyalah simulasi penyelamatan

sandera yang dikuasai perompak.

Danlanal Tanjung Balai Letkol Laut (p), R.H. Etwiory mengatakan, latihan tembakan dan simulasi penyelamatan sandera yang dikuasai perompak untuk menciptakan profesional prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan khususnya petugas patroli keamanan laut.

"Kegiatan pelatihan tembakan dalam menyelamatkan sandera, untuk melatih profesionalisme prajurit Tanjung Balai Asahan," kata Letkol Laut (p) R.H. Etwiory, Danlanal Tanjung Balai Asahan.

Kata dia, Lanal Tanjung Balai Asahan berkomitmen akan menjaga perairan Selat Malaka di wilayah perbatasan dari segala ancaman gangguan keamanan laut. ● mei

## Penyidik KPK Selidiki Dugaan Edhy Prabowo Gunakan Suap Benih Lobster untuk Beli Tanah

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekretaris pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Amiril Mukminin, terkait dugaan suap ekspor benih lobster.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Amiril diperiksa untuk mendalami bukti dugaan Edhy menggunakan uang hasil suap untuk pembelian aset berupa tanah.

"Penyidik masih terus mendalami terkait pengelolaan sejumlah uang yang dipercayakan oleh tersangka EP (Edhy Prabowo) kepada saksi (Amiril Mukminin) yang di antaranya juga diduga digunakan untuk pembelian aset berupa tanah," kata Ali, Sabtu (6/2).

"Adapun sumber uang pembelannya juga masih diduga berasal dari para ekspoktir benur yang mendapatkan izin

ekspor di KKP," ucap Ali.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa seorang pensiunan atas nama Makmun Saleh terkait dugaan transaksi pembelian tanah oleh Edhy pada Jumat (29/1) lalu. Dalam kasus ini, Edhy diduga diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dan 100.000 dollar AS dari Suharjito.

PT ACK diduga menerima uang tersebut dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Uang tersebut salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penempatan kegiatan ekspor benih lobster. ● han



IDN/ANTARA

## PERSIAPAN HPN 2021 BENGKULU

Anggota Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Bengkulu mengecat tugu pers di Bengkulu, Minggu (7/2). Pengecatan tersebut guna memperingati tugu tersebut jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Bengkulu.